

WAMENKUMHAM TERSERET DUGAAN SUAP RP 7 M, DUH!

Entah apa yang terjadi di negeri ini, saat berbagai kasus dugaan korupsi terendus satu per satu. Terbaru, Indonesia Police Watch (IPW) melaporkan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Prof. Edward Omar Sharif Hiariej atau dikenal dengan Eddy Hiariej, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diduga ada gratifikasi uang senilai Rp 7 miliar yang diterima asisten pribadi (aspri) guru besar dalam ilmu Hukum Pidana di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta itu. Eddy Hiariej pun telah buka suara dan mengatakan hal itu terkait hubungan profesional antara asprinya YAR dan YAM sebagai lawyer (pengacara) dengan kliennya, Sugeng (Ketua IPW). Semoga keruh kasus ini segera jernih.

(Baca Hal 11)

Government (Hal.2)
Soal Kejanggalaan
Rp 300 T di Kemenkeu,
PPATK-Bukan
Korupsi Pegawai



Tanah & Bangunan:

Rp 23.000.000.000

1. Tanah dan bangunan seluas 162 m2/162 m2 di Kab/ Kota Sleman yang merupakan hasil sendiri **Rp. 5.000.000.000**
2. Tanah dan bangunan Seluas 53 m2/53 m2 di Kab/ Kota Sleman yang merupakan hasil sendiri **Rp. 5.000.000.000**
3. Tanah dan bangunan Seluas 375 m2/375 m2 di Kab/ Kota Sleman yang merupakan hasil sendiri **Rp. 10.000.000.000**
4. Tanah dan bangunan Seluas 214 m2/214 m2 di Kab/ Kota Sleman yang merupakan hasil sendiri **Rp. 3.000.000.000**



Jenis kendaraan bermotor

Rp 1.121.856.647

1. Mobil Honda Odyssey tahun 2014 yang merupakan hasil sendiri senilai **Rp314.000.000**
2. Mobil Mini Cooper 5 Door A/T tahun 2015 yang merupakan hasil sendiri senilai **Rp468.000.000**
3. Mobil Jeep Cherokee Limited tahun 2014 yang merupakan hasil sendiri senilai **Rp428.000.000**



Kas dan setara Kas

RP 1.100.000.000



Utang

Rp 5.449.440.788

**KEKAYAAN
WAMENKUMHAM
EDWARD OMAR
SHARIF HIARIEJ**

**LHKPN
Tahun
2021**

Total harta kekayaan

Rp 19.882.415.859

Soal Kejanggalkan Rp 300 T di Kemenkeu, PPATK: Bukan Korupsi Pegawai



Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana (baju putih) menyambangi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada hari ini, Selasa (14/3/2023). (istimewa)

JAKARTA -- Usai membuat geger masyarakat Indonesia, akhirnya Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal Rp300 triliun yang melibatkan pegawai Kemenkeu. Ia mengatakan transaksi Rp300 triliun tersebut bukanlah korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kemenkeu. Melainkan terkait kasus perpajakan dan kepabeanan yang dilaporkan lembaganya ke Kementerian Keuangan selaku penyidik tindak pidana asal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Kami tadi fokus diskusikan terkait statement tentang adanya transaksi Rp300 triliun. Perlu disampaikan, seperti dipahami Kemenkeu adalah salah satu penyidik TPPU sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2010, dengan demikian setiap kasus yang berhubungan kepabeanan dan perpajakan kami sampaikan ke Kemenkeu," katanya dalam konferensi pers di Kemenkeu, Selasa (14/3/2023).

Dalam hal ini, Ivan menegaskan data transaksi Rp 300 triliun yang disampaikan itu adalah potensi tindak pidana awal pencucian uang yang harus ditindaklanjuti Kemenkeu sebagai pihak penyidik.

"Dalam kerangka itu perlu dipahami, ini bukan tentang adanya abuse of power dan adanya korupsi yg dilakukan pegawai Kemenkeu. Tapi ini lebih kepada tusi (tugas dan fungsi) Kemenkeu yang tangani kasus tidak pidana asal yang menjadi kewajiban kami pada saat kami melakukan analisis kami sampaikan ke Kemenkeu untuk ditindaklanjuti," jelasnya.

"Ini bukan tentang penyimpangan atau tindak korupsi pegawai Kemenkeu, ini karena posisi Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal. Sama seperti KPK, polisi, dan kejaksaan," imbuhnya.

Kendati demikian, Ivan mengakui dari total potensi pidana awal tindak

pidana pencucian uang itu ada juga yang menyeret pegawai Kemenkeu. Hanya saja, jumlahnya tidak besar dan langsung ditangani dengan baik oleh Kemenkeu.

"Memang ada satuan-satuan kasus yang kami peroleh langsung dari Kemenkeu terkait dengan pegawai, lalu kami temukan sendiri terkait pegawai tapi itu nilainya tak sebesar itu tapi nilainya minim dan ditangani dengan baik oleh Kemenkeu," pungkasnya.

Isu transaksi janggal senilai Rp 300 triliun mulanya dilempar Menko Polhukam Mahfud MD. Uang tersebut, kata dia, di luar transaksi janggal Rp 500 miliar dari rekening bekas pejabat

Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya.

"Saya sudah dapat laporan terbaru tadi pagi, malah ada pergerakan mencurigakan senilai Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai," kata Mahfud MD di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Rabu (8/3/2023).

Saham 134 Pegawai Pajak di 280 Perusahaan Dianalisa

Sejumlah 134 pegawai pajak Kemenkeu atau Kementerian Keuangan disebut memiliki saham di 280 perusahaan. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan pihaknya tengah menganalisis hal tersebut.

"Itjen (Inspektorat Jenderal Kemenkeu) sudah menerima hari Jumat siang kemarin, sedang kami analisis saat ini," kata Prastowo, Selasa (13/3/2023).

Lebih lanjut, dia mengatakan pihaknya tentu ingin memastikan kesesuaian nama termasuk jenis usahanya. Hal tersebut penting karena pihaknya juga harus berhati-hati.

"Karena menurut aturan kan tidak ada larangan sebenarnya PNS (Pegawai Negeri Sipil) itu berbisnis, yang penting memberitahukan dan melaporkan, juga menjaga tidak ada konflik kepentingan dan abuse of power. Itu yang harus dijaga betul,"

ujar Prastowo.

Dia menuturkan, dalam Pasal 5 PP Nomor 94 2021 tentang Disiplin PNS, tidak ada larangan tersebut. Tetapi yang dilarang adalah penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan.

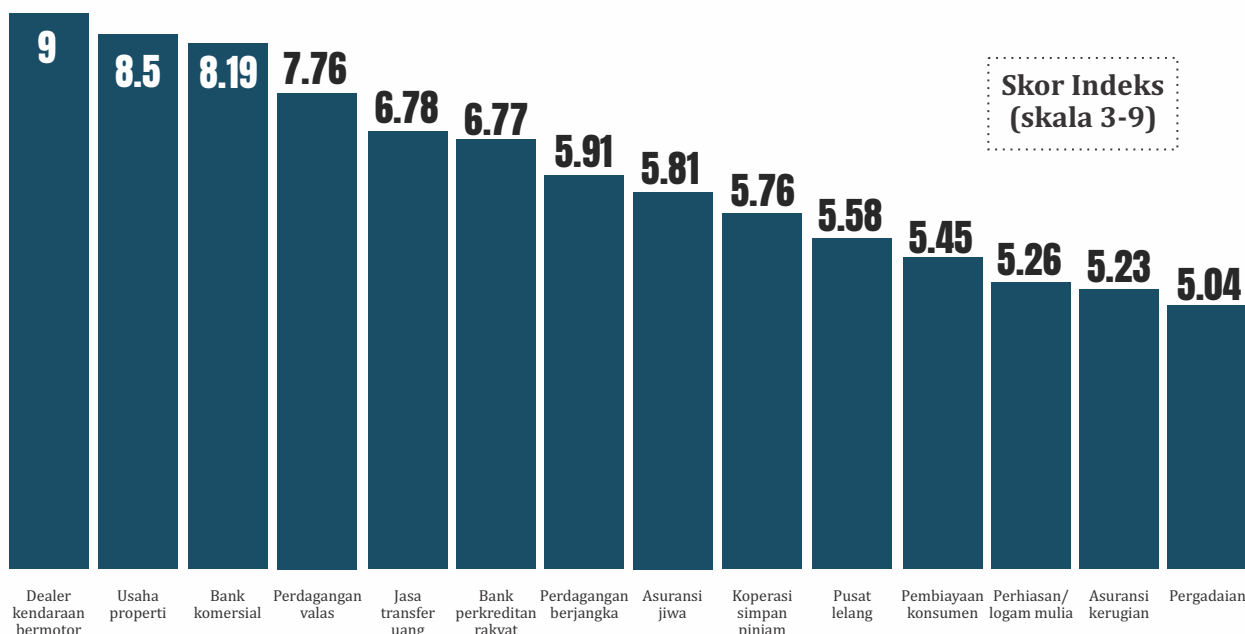
Oleh sebab itu, pegawai Kemenkeu boleh berbisnis seperti usaha catering, fotografi, jasa wisata, dan sebagainya. Prastowo mengatakan, biasanya pegawai Kemenkeu yang memiliki usaha biasanya langsung lapor ke atasan.

Sebelumnya, Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Pahala Nainggolan mengatakan kepemilikan saham oleh 134 pegawai pajak pada 280 perusahaan umumnya menggunakan nama istri mereka. Dia menduga, cara ini dilakukan untuk bermain aman.

"Ini bukan berarti 134 salah, tetapi dalam surat saya sebutkan tolong ditindaklanjuti kenapa mereka mempunyai perusahaan. Ini kan umumnya atas nama istrinya," kata Pahala pada Jum'at 10 Maret 2023 saat ditemui di Kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta.

Pahala mengakui, tidak ada peraturan yang melarang pegawai negeri untuk memiliki perusahaan saat ini. "Karena peraturan pemerintah yang tahun 1980 kan melarang PNS berbisnis, jadi pakai nama istri yang boleh. Revisi PP nya tahun 2010 nggak jelas, jadi amannya mungkin pake nama istrinya," kata dia. (wid,rls,ant/dya)

14 AKTIVITAS BISNIS DENGAN INDEKS RISIKO PENCUCIAN UANG TINGGI DAN MENENGAH DI INDONESIA (2021)



Kata Bos Pertamina Depo Plumpang Tak Bisa Tutup DPR Desak Buffer Zone Tuntas dalam 3 Bulan



Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati bersiap mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023). (istimewa)

JAKARTA - Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, memastikan Terminal BBM atau Depo Plumpang akan dipindahkan secara bertahap ke lahan PT Pelindo (Persero) di Tanjung Priok. Meski demikian, Nicke menyebut opsi menutup secara sementara tidak mungkin dilakukan karena akan mengganggu pasokan BBM nasional, sehingga langkah sementara yaitu membuat jarak aman atau buffer zone di sekitar Depo Plumpang. Akibat dari pembangunan buffer zone ini, lanjut dia, rumah warga yang sangat dekat dengan Depo Plumpang ini akan direlokasi.

"Warga ini yang (relokasi) di buffer zone, karena Terminal Plumpang tidak bisa kita tutup karena ini bisa berpengaruh terhadap ketahanan suplai nasional," tegasnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR, Selasa (14/3/2023).

Menurut Nicke, pembangunan buffer zone sangat krusial dan penting diutamakan untuk menjaga pasokan BBM serta memastikan keamanan dan keselamatan warga Plumpang. "Luasnya tentu ini ada standar-standar safety yang harus dipenuhi berdasarkan aturan yang berlaku internasional," sambung dia.

Dia memaparkan, Depo Plumpang tidak hanya menyimpan pasokan BBM, melainkan fasilitas lain yang kaitannya dengan LPG, pelumas, dan pusat teknologi. Adapun depo tersebut menyimpan 15 persen pasokan BBM untuk menyuplai 790 SPBU di 19 kabupaten/kota.

Dengan begitu, Depo Plumpang memiliki peran yang strategis untuk rantai pasok energi nasional.

Menurut dia, menutup dan memindahkan depo secara langsung pasti akan mengganggu distribusi nasional. "Karena itu, agar semuanya aman termasuk masyarakat sekitar dan operasional suplai aman, maka pembangunan buffer zone ini suatu hal yang wajib dilakukan," kata Nicke.

Nicke menjelaskan, tempat baru Depo Plumpang ini bernama Green Multipurpose Terminal di Kalibaru seluas 32 hektare, yang nantinya tidak akan berfungsi menyimpan pasokan energi fosil, melainkan digunakan untuk pengembangan bahan bakar ramah lingkungan. "Nanti lahan dari Pelindo baru siap dibangun di akhir 2024 jadi setelah itu baru kita siap membangun, itupun butuh waktu antara 2-3 tahun, sehingga Terminal Kalibaru ini mungkin baru jadi sekitar 4-5 tahun kemudian," pungkash Nicke.

Terpisha, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade meminta persoalan buffer zone rampung dalam 3 bulan. "Setelah peristiwa pilu kemarin, ini saatnya untuk menata ulang kawasan depo Pertamina Plumpang sebagai objek penting nasional yang harus dilindungi oleh negara. Dengan begitu, permukiman padat yang melanggar

tata ruang harus ditertibkan dan ditata kembali. Mengantisipasi peristiwa serupa tidak terjadi lagi, saya meminta Pertamina menyelesaikan persoalan buffer zone ini dalam tiga bulan," kata Andre dalam kesempatan yang sama.

Andre mengatakan zona penyangga di sekitar Depo Pertamina Plumpang diperlukan guna mengantisipasi peristiwa kebakaran yang menelan korban jiwa. Dia pun mendorong pihak Pertamina berkoordinasi dengan Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat guna mempercepat penataan buffer zone depo Plumpang. Bahkan bila perlu, lanjut Andre, masalah buffer zone dibawa ke rapat terbatas menteri kabinet Presiden Joko Widodo.

"Saya mendengar Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sudah pernah mengusulkan adanya buffer zone selebar 50 meter antara depo Pertamina Plumpang dan permukiman. Di forum rapat resmi ini saya meminta Pertamina segera berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk mengeksekusi kebutuhan buffer zone. Bila Pertamina mengalami kesulitan, saya minta Pertamina lapor ke Menteri BUMN supaya persoalan buffer zone ini segera dibawa ke rapat kabinet terbatas agar segera ada titik temu," kata Andre.

Andre mendorong perluasan buffer zone segera terealisasi. Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat ini menegaskan lagi soal target 3 bulan penuntasan buffer zone. "Komisi VI mendukung penuh perluasan buffer zone di sekitar Depo Plumpang. Saya minta persoalan ini selesai dalam tiga bulan. Ini terutama demi keselamatan masyarakat agar kejadian yang memakan korban tidak terulang kembali," kata Andre.

Bantuan Rp 1,7 M ke Korban

Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati

mengungkap jumlah bantuan yang disalurkan ke korban kebakaran depo Plumpang mencapai 1,72 miliar. Hal ini berdasarkan data tanggal 11 Maret 2023, yang dipaparkannya dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI. Adapun rinciannya, 74% atau sekitar Rp 1,26 miliar berasal dari Pertamina Group. Sementara 26% atau sekitar Rp 451 juta berasal dari BUMN.

Nicke mengatakan, bantuan diberikan kepada korban kebakaran, mulai dari biaya pemakaman, santunan duka, sampai biaya penguburan jenazah. "Ini yang kami berikan ada biaya pemakaman, ada santunan duka, sampai dengan jenazah dikebumikan ini pun kami fasilitasi. Nah kemudian untuk yang keluarga yang tunggu pasien kami siapkan akomodasinya," katanya.

Selain itu, Pertamina juga menyiapkan bantuan dan menyediakan kontrak hunian sementara bagi yang rumahnya terdampak. Barang-barang yang terbakar juga diganti rugi. "Dan warga yang terdampak rumahnya terbakar waktu itu mengungsi di posko-posko, ini kami siapkan bantuan untuk kontrak hunian mereka, baik itu yang kebutuhan sewa huniannya, maupun untuk mengganti dari barang-barang yang terbakar. Jadi ini yang kami berikan kepada warga," bebernya.

Nicke menjelaskan, saat ini posko penampungan warga sudah kosong. Padahal saat kejadian kebakaran depo, ada ribuan warga yang mengungsi.

"Posko Rasela pada saat peak ada sekitar 800 orang di sini, namun hari ini sudah tidak ada. Sudah kosong. Warga kemudian yang tadinya mengungsi di sini, yang terakhir ini kita langsung sewakan rumah untuk mereka tinggal. Kemudian posko PMI ini saat tertinggi adalah 266 orang, namun sekarang kosong. Demikian di Posko Lurah Tugu Selatan, Maupun di Lurah Rawa Badak selatan," pungkashnya. (wid,rls,ist/dya)

KEBAKARAN DEPO & KILANG PERTAMINA



DEPO PLUMPUANG (JAKARTA UTARA)

Tanggal: 3 Maret 2023

Titik kebakaran: Area penerimaan BBM

Korban meninggal: 19 orang*

KET

(* per 6 Maret 2023)

(**) meninggal karena serangan jantung saat tangki meledak



KILANG MINYAK BALIKPAPAN (KALIMANTAN TIMUR)

Tanggal: 4 Maret 2022

Titik kebakaran: Plant 3

Korban meninggal: Tidak ada

Tanggal: 15 Mei 2022

Titik kebakaran: Plant 5

Korban meninggal: 1 orang



KILANG MINYAK BALONGAN (INDRAMAYU, JAWA BARAT)

Tanggal: 29 Maret 2021

Titik kebakaran: Tangki T-301G

Korban meninggal: 1 Orang**

Tanggal: 7 September 2022

Titik kebakaran: Tangki 107

Korban meninggal: Tidak ada



KILANG MINYAK CILACAP (JAWA TENGAH)

Tanggal: 11 Juni 2021

Titik kebakaran: Tangki T-205

Korban meninggal: Tidak ada

Tanggal: 13 November 2021

Titik kebakaran: Tangki 36T-102

Korban meninggal: Tidak ada

Bocoran Subsidi Mobil Listrik, Rp 25 Juta hingga Rp 80 Juta Per Unit

JAKARTA - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang membocorkan besaran subsidi pemerintah untuk pembelian mobil listrik per unit, yaitu berkisar Rp25 juta hingga Rp80 juta. Agus mengatakan bantuan itu akan diberikan kepada dua mobil listrik, yakni Wuling Air EV dan Hyundai Ioniq 5. M

"Bantuan pemerintah untuk yang mobil kebetulan yang TKDN 40 persen baru dua, Ioniq 5 dan Wuling. Kira-kira bantuannya sekitar Rp70-an juta juga. Jangan disebut memastikan, tapi sekitar Rp70-80 juta bantuan pemerintah untuk mobil Ioniq 5," kata Agus, Selasa (14/3/2023).

"Kalau untuk Wuling bantuan pemerintah akan sekitar Rp25-35 juta. Ini masih kita hitung dan kita lakukan segera," imbuhnya.

Agus menjelaskan bantuan untuk kendaraan listrik bukan sebagai insentif atau subsidi. Ia menegaskan untuk bisa mendapat bantuan maka mobil tersebut harus memenuhi syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di atas 40 persen. "Karena memang local content itu yang menjadi sangat penting bagi pemerintah untuk meluncurkan bantuan pemerintah. Jadi ini bukan insentif bukan subsidi. Ini bantuan dari pemerintah," ujar Agus.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan alasan dibalik syarat TKDN 40 persen itu karena

pemerintah ingin tetap ada penyerapan tenaga kerja di dalam negeri. "Kenapa local content penting? Karena kita ingin at least penyerapan tenaga kerja tetap ada di Indonesia. Merek boleh Hyundai, tapi 40 persen local content Indonesia. Artinya ada penyerapan tenaga kerja di Indonesia," katanya menambahkan.

Agus mengatakan bantuan pemerintah untuk kendaraan listrik berlaku serentak 20 Maret 2023. Ia menyebut mobil elektrifikasi bertenaga hybrid tidak mendapat bantuan.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Dody Widodo mengatakan, pemberian insentif kendaraan listrik menjadi salah satu strategi pemerintah Indonesia dalam meningkatkan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. "Pemerintah menyediakan insentif untuk pembelian kendaraan listrik sebesar Rp 7 juta per unit pada 2023 untuk 200 unit motor listrik dan Rp 7 juta per unit untuk 50 ribu motor konversi ke motor listrik," kata Dody, dalam acara Indonesia Leading Economic Forum 2023, di Hotel St. Regis Jakarta, Selasa (14/3/2023).

Berdasarkan materi yang disajikannya pada acara tersebut, total anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk insentif motor listrik mencapai Rp 1,4 triliun untuk

2023. Kemudian, jumlah ini juga akan meningkat pada 2024 menjadi Rp 4,2 triliun. Rinciannya yakni insentif Rp 7 juta untuk 600 ribu unit motor listrik.

Adapun jumlah tersebut belum termasuk insentif untuk motor konversi. Apabila diasumsikan insentif sebesar Rp 7 juta untuk 250 motor listrik sekaligus motor konversi di 2023, maka total dana insentif yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp 1,75 triliun.

Sementara untuk mobil listrik, tercantum total anggaran yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp 1,6 triliun. Angka ini juga rencananya akan ditingkatkan pada 2024 menjadi Rp 4,9 triliun. "Strategi diharapkan efektif karena Kementerian Perindustrian memiliki KPI untuk program membeli kendaraan listrik. Kendaraan ini minimal harus memiliki TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) 40%," katanya.

Tidak hanya itu, dalam materi yang ia sajikan juga nampak besaran dana insentif yang akan digelontorkan



Mobil listrik Wuling Air EV mendapat bantuan pemerintah sekitar Rp25-35 juta per unit. (dok)

pemerintah untuk bus listrik yakni mencapai Rp 48 miliar. Anggaran ini juga akan ditingkatkan pada 2024 menjadi Rp 144 miliar.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya mengumumkan subsidi kendaraan listrik di Indonesia. Pemberian subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat terhadap kendaraan listrik yang lebih luas, serta memacu perkembangan industri otomotif energi baru.

Subsidi akan bersifat terbuka terhadap kuota yang diberikan pemerintah yaitu 35.900 unit mobil listrik hingga Desember 2023. Sejahter ini hanya Hyundai dan Wuling yang memenuhi syarat mendapatkan subsidi. (wid,rls,ant/dya)

11.000 Titik Pengerjaan Jamban Digeber, Surabaya Optimis Bebas BABS Tahun 2023



Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Ikhsan menyampaikan sejumlah pemaparan strategi Pemkot Surabaya dalam penuntasan ODF atau Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kota Pahlawan di Lobi Lantai 2 Balai Kota Surabaya, Selasa (14/3/2023). (humas)

SURABAYA - Tim Verifikasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) hadir di Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam kegiatan Verifikasi Kota Surabaya Menuju Open Defecation Free (ODF) Tahun 2023, di Lobi Lantai 2 Balai Kota Surabaya, Selasa (14/3/2023). Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Ikhsan menyampaikan

sejumlah pemaparan strategi Pemkot Surabaya dalam penuntasan ODF atau Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kota Pahlawan.

Seusai pemaparan, Sekda Ikhsan mendampingi Ketua Tim Verifikasi ODF Pemprov Jatim Mohamad Yoto beserta perwakilan dari UNICEF Afriyanto, USAID IUWASH Tangguh Ratih, BKMP (Badan Kerja Sama dan Manajemen Pengembangan) Unair Corie Indria dan Ronnie Prasetyo, dan Ketua Umum APPSANI (Asosiasi Pengelola dan Pemberdayaan Sanitasi Indonesia) Koen Irianto Urip melakukan pengambilan sampel verifikasi pada 20 kelurahan dari 10 kecamatan di Kota Surabaya.

Sebanyak 20 kelurahan dari 10 kecamatan di Kota Surabaya diantaranya, Kelurahan Asemrowo dan Genting Kalianak dari Kecamatan

Asemrowo, Kelurahan Rungkut Tengah dan Rungkut Menanggal dari Kecamatan Gunung Anyar, Kelurahan Kalisari dan Kejawan Putih Tambak dari Kecamatan Mulyorejo, serta Kelurahan Kutasari dan Panjang Jiwo dari Kecamatan Tenggilis Mejoyo.

Selanjutnya, Kelurahan Sidotopo Wetan dan Bulak Banteng dari Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Kebonsari dan Ketintang dari Kecamatan Jambangan, Kelurahan Gayungan dan Ketintang dari Kecamatan Gayungan, Kelurahan Dukuh Kupang dan Prada Kali Kendal dari Kecamatan Dukuh Pakis, beserta Kelurahan Tembok Dukuh dan Bubutan dari Kecamatan Bubutan.

Sekda Ikhsan menyampaikan, kedatangan Tim Verifikasi ODF Pemprov Jatim ingin melakukan pengecekan mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Kota Pahlawan, salah satunya pada menghentikan perilaku BABS.

"Tim verifikasi mengecek yang berkaitan dengan ODF atau stop BABS di Kota Surabaya seperti apa. Karena Pak Walikota (Eri Cahyadi) selalu

menyampaikan bagaimana upaya kita mensejahterakan masyarakat. Salah satunya membantu masyarakat terhadap perilaku hidup sehat pada proses sanitasi melalui pembangunan jamban," kata Sekda Ikhsan.

Oleh sebab itu, Pemkot Surabaya menyiapkan 11.000 titik pengerjaan jamban di masyarakat, karena memang masih ada warga kita yang masih belum punya jamban. Sampai bulan Februari dan Maret ini, sudah 4.000 pengerjaan yang selesai," ujarnya.

"Tahun ini di Surabaya ada 11.000 yang kita siapkan untuk pembangunan jamban di masyarakat, karena memang masih ada warga kita yang masih belum punya jamban. Sampai bulan Februari dan Maret ini, sudah 4.000 pengerjaan yang selesai," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengaku bahwa peran aktif dan kesadaran masyarakat Kota Surabaya terhadap kepeduliannya dalam lingkungan terus meningkat. Peningkatan PHBS itulah yang diapresiasi oleh Tim Verifikasi ODF Pemprov Jatim. (mira,rls/dya)

Kemenag Tegaskan Biaya Haji Sama, Tak Bedakan Usia



KepKemenhub menyatakan, Bandara Kertajati di Majalengka sudah memenuhi persyaratan standar pelayanan penerbangan haji 2023. (dok)

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan penyusunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tidak membedakan usia jamaah. Apakah masuk kategori muda atau lanjut usia (lansia) nilainya samasuai kesepakatan bersama DPR RI.

"Biaya haji (reguler) ini sama semua, tidak ada perbedaan antara muda dan tua. Ini juga sejalan dengan konsep istithaah, karena haji adalah kewajiban bagi mereka yang mampu," ujar Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief di Jakarta, Selasa (14/3/2023).

Penegasan Hilman tersebut menepis pernyataan firma hukum Haris Azhar Law Office. Dalam keterangannya, Haris Azhar Law Office mendesak agar negara mengecualikan pembebanan biaya tambahan pelunasan haji pada jamaah calon haji lansia yang masuk kategori lunas tunda 1443 H/2022 Masehi sebesar Rp9.400.000 dan jamaah haji lansia tahun 1444 H/2023 M sebesar Rp23.500.000.

"Semua proses pembahasan dana haji juga dilakukan terbuka, transparan, dan akuntabel melalui mekanisme pembahasan bersama antara pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama bersama Komisi VIII DPR," kata Hilman.

Hilman menjelaskan bahwa BPIH yang telah ditetapkan bersama DPR tidak semestinya diistilahkan sebagai pembebanan. Pasalnya, tidak semua BPIH itu dibayarkan sepenuhnya oleh jamaah calon haji.

Dalam rapat kerja yang

berlangsung pada 15 Februari 2023, Pemerintah dan Komisi VIII DPR telah menyepakati besaran BPIH 1444 H/2023 M dengan rata-rata Rp90.050.637,26 per haji reguler.

Angka tersebut terdiri atas dua komponen, yaitu Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jamaah dengan rata-rata Rp49.812.700,26 (55,3 persen) dan penggunaan nilai manfaat per anggota jamaah sebesar Rp40.237.937 (44,7 persen).

Dengan skema ini, penggunaan dana nilai manfaat keuangan haji secara keseluruhan mencapai Rp8 triliun. Selain itu, disepakati juga adanya afirmasi khusus bagi jamaah lunas tunda tahun 2020 sehingga dibutuhkan tambahan nilai manfaat mencapai Rp845 miliar.

"Jadi dalam komposisi BPIH, jamaah sebenarnya hanya membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih dengan rata-rata 55,3 persen. Sisanya, anggaran diambilkan dari nilai manfaat dengan rerata 44,7 persen," kata dia.

Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, kata dia, jamaah calon haji lansia yang akan berangkat cukup banyak. Dari 203.320 kuota haji reguler, diperkirakan sekitar 64 ribu di antaranya masuk kategori lansia. "Banyaknya jamaah haji lansia, menjadi perhatian Kementerian Agama. Bahkan, penyelenggaraan tahun ini mengusung tagline 'Haji Ramah Lansia'," kata Hilman.

Tambahan Kuota untuk Petugas

Di sisi lain, hasil kunjungan kerja Menteri Agama RI H Yaqut Cholil Qoumas dengan Pemerintah Arab Saudi adalah soal penambahan jatah kuota haji Indonesia 2023 ini. Kuota tambahan itu akan difokuskan untuk jatah petugas haji. Agar bisa melayani calon jamaah haji lansia. "Ya Alhamdulillah dapat kuota tambahan untuk petugas haji. Indonesia menjadi prioritas Kerajaan Arab Saudi," jelas Yaqut yang belum memberikan data soal jumlah kuota tambahan yang dimaksud.

Kenapa fokus tambahan untuk petugas? Menurut Gus Yaqut dari 203.320 kuota haji reguler ada lebih 64 ribu jamaah calon haji (JCH) yang masuk kategori lanjut usia, lansia. "Jadi tambahan kuota petugas akan difokuskan dalam penguatan layanan jamaah calon jamaah haji yang lanjut usia, lansia," jelasnya.

Dilansir kemenag.go.id, Menag telah meminta kepada Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah Tawfiq bisa menyampaikannya

tambahan kuota lebih awal. Sebab, selalu saja butuh waktu persiapan dalam proses pengisian kuota jamaah. Mulai dari penyiapan dokumen, paspor, pemvisaan, serta penyediaan layanan. "Saya minta agar tambahan kuota jamaah disampaikan lebih awal, agar bisa terserap maksimal," tegasnya.

Karena sudah mendapat tambahan kuota haji untuk petugas kini Kemenag akan ada rekrutmen khusus petugas lagi. "Perlu rekrutmen khusus untuk pengisian tambahan kuota petugas, dan ini difokuskan pada penguatan layanan lansia," tegas Gus Men.

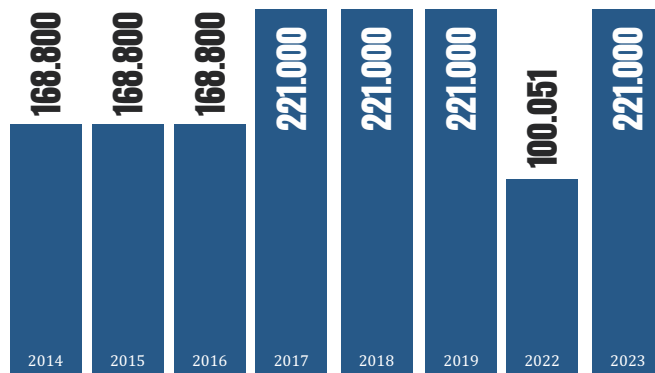
Diketahui, sejak awal Gus Men akan memberikan perhatian kepada para jamaah calon haji yang lansia. Apalagi penyelenggaraan musim haji 2023 tahun ini mengusung tagline: Haji Ramah Lansia.

Sejumlah persiapan pelayanan saat ini terus dipersiapkan. Hal-hal detail menjadi perhatian, antara lain penambahan toilet perempuan di Arafah dan Mina. Sebab, mayoritas jamaah Indonesia adalah perempuan. Mereka juga membutuhkan waktu lebih lama saat di toilet.

Selain penambahan kuota untuk petugas, persoalan yang dibicarakan dalam kunjungan kerja Gus Men adalah pelayanan fast track. Tahun ini, fast track akan kembali dilaksanakan di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), bagi jamaah dari DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat.

Layanan fast track, sudah dimulai sejak 2018. Melalui layanan ini, proses migrasi jamaah haji dilakukan sejak di bandara Indonesia. Sehingga, jamaah tidak perlu diperiksa paspor dan visanya lagi saat tiba di Arab Saudi. Jumlah jamaah calon haji yang akan dilayani oleh fasilitas fast track tahun ini baru sebanyak 55.321 jamaah. "Saya sampaikan ke Menteri Tawfiq agar bisa ditambah untuk bandara lainnya," tegasnya. (wid,rls,ant/dya)

KUOTA HAJI INDONESIA (TAHUN 2014-2023)



JADWAL IBADAH HAJI 2023

- KLOTER PERTAMA**
Akan berangkat ke Madinah pada tanggal 24 Mei 2023.
- KLOTER KEDUA**
Akan berangkat melalui Jeddah pada tanggal 8 Juni 2023.
- KEPULANGAN KLOTER PERTAMA**
Pada tanggal 4 Juli 2023.
- KEPULANGAN KLOTER TERAKHIR**
Pada tanggal 2 Agustus 2023.

Kategori	Jumlah	Status
KUOTA HAJI REGULER	203.320	JAMAAH
	84.609	JAMAAH (lunas tunda 2020)
	9.864	JAMAAH (lunas tunda 2022)
	108.847	JAMAAH (belum lunas)



LEE DONG HYUN

Kian Tenar di Film The Glory



The Great Show.

Lee membintangi *Scouting Report*, drama kelima dari musim kesepuluh Drama Spesial KBS, di mana ia memenangkan "Aktor Terbaik dalam Penghargaan Satu Babak/ Spesial/ Drama Pendek" di Penghargaan Drama KBS ke-33.

Pada tahun 2020, Lee mendapat peran utama pertamanya dalam komedi romantis *18 Again*, berdasarkan film Amerika 2009 *17 Again*.

Penampilannya dalam drama membuatnya mendapatkan penghargaan Aktor Pendatang Baru Terbaik di televisi pada Baeksang Arts Awards ke-57.

Lee Dong-hyun juga mendapatkan penghargaan Aktor Pendatang Baru Terbaik di APAN Star Awards ke-7. Dia mendapat peran utama dalam Netflix's *Sweet Home*, diadaptasi dari webtoon dengan nama yang sama.

Pada tahun 2022, Lee membintangi serial web *Reincarnation Romance*, sebuah serial web pendek yang mengiklankan pil mabuk perjalanan. Ini adalah reuni ketiga dengan Go Min-si.

Pada bulan Desember, Lee kembali ke layar kaca dengan drama Netflix yang ditulis oleh penulis Kim Eun-sook berjudul *The Glory*, bersama Song Hye-kyo.

LEE Dong-hyun sempat menjadi perbincangan penggemar film drama korea atau drakor karena melakukan adegan romantis dengan mantan istri Song Joong Ki dalam film *The Glory*.

Orang-orang banyak mencari detail profil Lim Dong-hyun, yang akan berusia 28 tahun pada 2023. Dia lahir pada 11 April 1995 dan dikenal sebagai aktor asal Korea Selatan.

Lee Do-hyun juga terkenal karena perannya di *Hotel del Luna* (2019), *18 Again* (2020), *Sweet Home* (2020), *Youth of May* (2021) dan *The Glory* (2022-2023)

Lee adalah seorang putra sulung dan memiliki seorang adik laki-laki, Im Dong-hyuk. Lee lulus dari Departemen Film dan Teater di Universitas Chung-Ang.

Dia juga melakukan debut aktingnya di *Prison Playbook* komedi hitam tahun 2017, di mana dia

memerankan versi muda dari karakter Jung Kyung-ho.

Pada tahun 2018, Lee berperan dalam serial televisi romantis *Still 17* dalam peran pendukung sebagai anggota klub dayung sekolah menengah tersebut.

Untuk penampilannya, ia dinominasikan dalam kategori "Character of the Year" di SBS Drama Awards 2018 bersama Ahn Hyo-seop dan Jo Hyun-sik.

Pada tahun yang sama, Lee juga tampil di *Clean with Passion for Now*, yang berperan sebagai adik laki-laki dari pemeran utama wanita dan atlet Taekwondo yang menjanjikan.

Pada tahun 2019, Lee bergabung dengan pemeran serial televisi fantasi kelam *Hotel del Luna* yang menjadi salah satu drama Korea dengan rating tertinggi di televisi kabel. Dia juga membuat penampilan khusus di tvN's

BIODATA DAN PROFIL

Nama Lengkap:

Lim Dong Hyun

Nama Panggung:

Lee Do Hyun

Nama Panggilan:

Melodrama Prince

Tempat, Tanggal Lahir:

Korea Selatan, 11 April 1995

Kewarganegaraan:

Korea Selatan

Pendidikan:

Chung-Ang University (Jurusan Teater dan Film)

Agama:

Kristen Protestan

FAKTA MENARIK

- Sewaktu SMA, ia pernah menjadi atlet basket.
- Memiliki adik laki-laki dengan cacat perkembangan.
- Harapannya adalah ingin dikenal sebagai Aktor Penyelamat Orang dari aktingnya.
- Selain suka bermain basket, ia juga suka bermain gitar dan bermain dengan anjing miliknya.
- Pernah berkuliah di Chung-Ang University jurusan Teater dan film.
- Kepribadian yang lucu membuatnya kembali diundang di variety show *Running Man* pada episode 496, 499 dan 510.
- Debutnya dimulai dari menjadi peran sebagai Jung Kyung-ho muda di drama dark komedi *Prison Playbook* pada 2017.
- Pada tahun 2018, ia berperan sebagai anggota klub dayung SMA dan teman dari pemeran utama kedua di drama *Still 17* (berbagai sumber)





KIAT MENGATASI ANAK YANG SUSAH MAKAN

ANAK susah makan adalah kondisi yang banyak dikeluhkan oleh orangtua. Meski kondisi ini cukup umum, tapi tak bisa dipungkiri anak yang menolak makan membuat orang

frustrasi hingga terpancing emosi.

Bahkan tak jarang, beberapa orang tua (khususnya ibu) sering mengibaratkan bahwa separuh masalah ibu terangkat ketika melihat anak mau makan.

Bagaimana tidak, kerap kali, seorang ibu telah berusaha mencari resep makanan menarik hingga berkulat berjam-jam di dapur untuk membuat suatu makanan yang ketika disajikan langsung ditolak mentah-mentah oleh buah hati.

Dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Universitas Indonesia dr. Yoga Devaera, Sp.A(K) membagikan kiat mengatasi anak yang makan dalam jumlah sedikit atau susah makan, antara lain keluarga harus mampu menjadi panutan yang baik untuk anak.

"Sayangnya nggak bisa juga kalau kita mengharap anak makan sehat, tapi, keluarga yang makannya nggak sehat,

nggak mungkin. Jadi, harus ada role model (panutan) dalam keluarga," kata Yoga saat diskusi kesehatan di Jakarta, Sabtu.

Selain pentingnya panutan, Yoga mengatakan orang tua juga tidak boleh menyerah untuk memperkenalkan makanan-makanan baru kepada anak. Jika hari ini anak menolak makanan yang disajikan, orang tua dapat mencobanya kembali dalam tiga hari atau satu minggu ke depan dengan harapan semakin sering dihidangkan maka lama-kelamaan anak akan terbiasa.

"Kapan boleh menyerahnya? Kalau sudah lima belas kali mencoba anaknya nggak mau juga, baru itu namanya nggak doyan. Tapi, baru (coba) dua kali, misalnya, setiap dikasih (daging) hati 'nggak mau, nih, Dok'. Nggak boleh menyerah, coba lagi nanti," kata Yoga.

Meskipun begitu, Yoga juga mengingatkan bahwa membina selera makan anak seharusnya dimulai sejak awal, yaitu sejak anak masih dalam kandungan dan saat fase menyusui.

Ibu diingatkan untuk tidak terlalu memilih-milih makanan yang dikonsumsi.

Keragaman jenis makanan bergizi yang dikonsumsi ibu hamil dan menyusui secara tidak langsung akan mempengaruhi kondisi anak.

"Sehingga sejak dalam kandungan ini, bayi sudah terbiasa dengan rasa makanan yang dimakan oleh ibunya. Ilmu pengetahuan menunjukkan

bahwa ternyata air ketuban itu ada rasanya, sesuai dengan yang dimakan ibu. Jadi, kalau ibunya terbiasa makan segala jenis makanan tentu pada saat (bayi) makan MPASI (makanan pendamping air susu ibu), dia sudah nggak asing," kata Yoga.

Anak yang kekurangan asupan nutrisi sesuai kebutuhannya dikhawatirkan dapat mengalami masalah kesehatan.

Misalnya, dalam jangka pendek anak mudah terkena penyakit infeksi yang kemudian juga akan semakin mempengaruhi kurangnya nafsu makan.

"(Saat sakit) pasti nafsu makan anak turun, tingkat nafsu makan anak turun. Anaknya makin kurus, makin gampang lagi kena penyakit. Jadi itu kayak siklus lingkaran setan, ya, karena memang anak yang punya masalah nutrisi, daya tahan tubuhnya menjadi rendah," kata Yoga.

Dalam jangka panjang, kata Yoga, anak berpotensi mengalami stunting dengan risiko mengalami kemampuan belajar dan fungsi kognitif yang lebih rendah.

Salah satu upaya pencegahan stunting yaitu dengan melakukan pemantauan pertumbuhan berkala sehingga dapat mendeteksi perlambatan pertumbuhan lebih awal.

Yoga juga mengingatkan orang tua untuk selalu berkonsultasi dengan dokter anak untuk mendapatkan rekomendasi penanganan yang tepat untuk anak (Ant)



KAMPUS DAN PENELITIAN FARMASI



PELBAGAI hasil penelitian di pendidikan tinggi atau universitas berpotensi memiliki muara pada kemandirian farmasi nasional yang merupakan keniscayaan sehingga produk dari penelitian tersebut sekaligus bisa diserap oleh industri pasar dan digunakan oleh masyarakat luas.

"Banyak muatan dan hasil penelitian bermuara kepada kemandirian farmasi yang bisa diserap oleh pasar.

Tentunya lewat riset dan penelitian yang berbasis kebutuhan pasar maka hal tersebut bisa lebih cepat dan ditawarkan kepada industri," kata Dekan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia Prof. Dr. Arry Yanuar, M.Si., di Jakarta, Senin.

Menurut Arry, pelbagai riset dan penelitian yang mengacu pada perkembangan pasar menjadi hal penting guna mendukung upaya kemandirian farmasi nasional.

Karena itu, kata Arry, pihak akademisi selalu membutuhkan masukan dari industri farmasi mengenai hal-hal apa saja yang perlu dikembangkan demi kepentingan masyarakat.

"Tentu saja pihak industri yang paling mengetahui apa yang menjadi kebutuhan di masyarakat. Kerja sama yang terjalin baik antara kampus dengan industri selama ini akan mendukung kemandirian farmasi kita," jelasnya.

Sementara itu Dekan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, Prof. Dr.

apt. Syamsudin, M.Biomed, mencermati pentingnya riset hilirisasi terkait fitofarmaka atau pemanfaatan obat dari bahan-bahan alam yang telah teruji klinis yang dapat menjadi kunci kemandirian farmasi nasional.

Seperti diketahui, obat berbahan alam di Indonesia terbagi dalam tiga kelompok yaitu jamu yang berbasis empiris, obat herbal terstandar (OHT) yang telah melalui proses uji praklinik, serta fitofarmaka yang sudah melewati uji pra-klinik sekaligus uji klinik.

"Sesuai arahan Mas Menteri Nadiem Makariem, maka kami di dunia pendidikan tinggi memang mengarahkan riset ke hilirisasi dengan menggandeng industri farmasi. Tentunya pihak industri bisa

membantu menyebarluaskan produk penelitian tersebut demi digunakan oleh masyarakat luas," tutup Syamsudin.

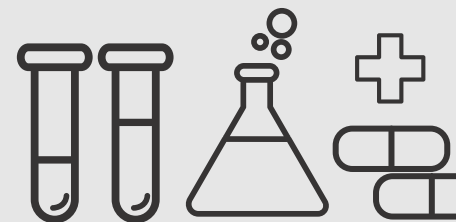
Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi telah ditegaskan bahwa perguruan tinggi bertugas menyelenggarakan IPTEK melalui pendidikan dan melaksanakan fungsinya menyiapkan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan IPTEK, dan bertanggung jawab meningkatkan kemampuan tridarma perguruan tinggi.

Perguruan tinggi juga memiliki peran strategis dalam menguatkan kedudukan IPTEK sebagai modal investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pembangunan nasional.

Salah satu tujuan Sistem Nasional IPTEK adalah meningkatkan kemandirian dan daya saing bangsa yang bermakna bahwa perguruan tinggi yang didukung oleh lembaga litbang (LPNK, LPK, dan Badan Usaha) dan tenaga terampil pendidikan tinggi agar dapat memberikan kontribusi dalam penguatan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perguruan tinggi harus lebih didorong dan difasilitasi untuk dapat menghasilkan lebih banyak lagi invensi dan inovasi yang menghasilkan hilirisasi teknologi tepat guna, menciptakan nilai tambah, serta meningkatkan produksi dan penggunaan komponen dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.

Agar amanah di atas dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mencapai tujuan dan standar tertentu (Berbagai sumber)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"

PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI

OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)

PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)

PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)

REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)

MEDIA TERVERIFIKASI



BIRO: SURABAYA: LUTFI YUHANDI | **MOJOKERTO:** RAHMAD SURYADI | **GRESIK-LAMONGAN:** ASEPTA YOGA P (ID SERTIFIKASI 3189) | **KEDIRI-JOMBANG-NGANJUK:** GATOT SUNARKO | **TAPAL KUDA (PASURUAN-PROBOLINGGO BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI):** IMAN SANTOSO, | **MADIUN:** IMAM GHOZALI (ID SERTIFIKASI 11563), | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **TRENGGALEK:** ANGGA PRAYOGA

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO | **SEKERTARIS** ISTIDHA NUR AMANAH,

DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, KIKI AMALIA GUYEN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

7 DARI 10 KONSUMEN BELANJA DARING

SEBUAH studi yang dilakukan oleh Zebra Technologies mencatat bahwa sebanyak 7 dari 10 konsumen di kawasan Asia Pasifik cenderung memilih berbelanja secara daring dan sekaligus datang ke gerai, serta menyukai peritel daring yang juga memiliki gerai fisik.

Mengacu hasil studi tersebut, pada era ini konsumen menginginkan pengalaman berbelanja tanpa hambatan sekaligus terpadu di berbagai kanal, bahkan untuk sesuatu hal kecil seperti memesan kopi.

"Kita tahu pandemi telah mengubah cara orang berbelanja. Kami dulu berpikir bahwa selama pandemi orang-orang tidak punya pilihan berbelanja selain daring. Tetapi ketika negara-negara melonggarkan pembatasan seperti sebelum COVID, maka kita melihat bangkitnya kegiatan berbelanja di gerai," kata Senior Vice President and General Manager, Zebra Technologies Asia Pacific

Ryan Goh dalam kegiatan jumpa media di Bali, beberapa waktu lalu.

Menjawab peluang dunia bisnis ritel tahun 2023, berdasarkan survei tersebut maka peritel tradisional yang memiliki toko fisik semestinya juga mempertimbangkan tentang optimalisasi penjualan secara daring.

"Banyak dari kita --saya tidak tahu bagaimana dengan Indonesia, yang tinggal di AS atau Singapura, memesan kopi secara daring. Hal yang luar biasa adalah ketika saya memesan kopi secara daring maka hal itu jauh lebih cepat ketimbang mengantre. Jadi begitulah, penggabungan daring dan gerai mendorong permintaan dalam ritel," katanya.

Lebih lanjut Ryan mengatakan perusahaan yang menawarkan teknologi semacam itu akan berada pada posisi yang jauh lebih menguntungkan daripada mereka yang tidak menerapkannya.

Karena itulah perusahaan membutuhkan banyak aspek yang dipertimbangkan seperti optimalisasi inventaris termasuk pencegahan kerugian, pemberdayaan karyawan frontline dengan jumlah yang lebih sedikit namun dibekali perangkat teknologi mumpuni, serta meningkatkan pengalaman konsumen berbelanja di gerai.

Tiga hal ini, kata Ryan, menjadi prioritas pelanggan Zebra Technologies.

"Bagaimana caranya agar pelanggan kami tahu bahwa mereka memiliki inventaris yang

tepat di tempat yang tepat agar tidak kehilangan konsumen? Bagaimana pelanggan bisa mencegah kerugian? Kita berbicara soal meningkatkan pengalaman konsumen, mereka melakukan checkout secara mandiri dan menjadikan hal itu salah satu pengalaman utama berbelanja," ujar Ryan.

Selama ini Zebra memiliki ekosistem yang terdiri dari lebih dari 10.000 mitra di lebih dari 100 negara dan melayani pelanggan dari semua skala dengan portofolio pemenang penghargaan untuk hardware, software, layanan serta solusi digital dan otomatisasi alur kerja.

Pengalaman digital

Chief Technology Officer Zebra Technologies Tom Bianculli mengatakan bahwa pekerja atau karyawan muda menginginkan adanya pengalaman digital dalam membantu pekerjaannya.

Menurut Bianculli, hal ini didorong

oleh generasi muda yang sudah terpapar dengan teknologi digital sejak dini, atau biasa disebut dengan istilah digital natives.

"Di tengah pertanyaan 'apakah semua orang siap dengan teknologi yang dinamis dan tuntutan untuk belajar dengan cepat', di sisi lain, ada digital natives — pekerja muda dan baru yang memiliki keinginan untuk mendapatkan pengalaman kerja terkini, bahkan ter-otomasi," kata Bianculli.

"Pengalaman digital yang semakin baik inilah yang ingin didapatkan oleh para pekerja ini setidaknya dalam 3 atau 4 tahun terakhir," ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Bianculli tak menampik bahwa perubahan ini merupakan tren yang kian bertumbuh. Terlebih, adanya pandemi COVID-19 yang telah mengubah kultur bekerja dan memanfaatkan teknologi digital dengan lebih baik dan luas untuk banyak bidang (Ant)



Wamenkumham (dari hal 1)

KETUA Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso melaporkan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Prof. Edward Omar Sharif Hiariej atau dikenal dengan Eddy Hiariej, ke KPK. Pelaporan itu terkait dugaan penerimaan uang Rp 7 miliar.

"Jadi saya datang hari ini untuk membuat pengaduan ke Dumas terkait dugaan tindak pidana korupsi, berpotensi dugaannya bisa saja pemerasan dalam jabatan bisa juga gratifikasi atau yang lain," kata Sugeng kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (14/3/2023).

"Yang terlapor itu saya menyebutkan penyelenggara negara dengan status Wamen. Wamen saya sebut dengan inisial EOSH [Edward Omar Sharif Hiariej]," lanjutnya.

Sugeng tidak merinci lebih jauh perihal penerimaan uang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa uang diduga diterima asisten pribadi Eddy. "Jadi ini terkait adanya aliran dana sekitar Rp 7 miliar yang diterima melalui dua orang yang diakui oleh EOSH tersebut sebagai asprinya. Diterima melalui asprinya dalam kaitan, dugaan saya, adalah jabatan walaupun peristiwa tersebut terkait dengan permintaan bantuan seorang warga negara kepada Wamen," ungkap Sugeng. "Saya katakan ada aliran dana Rp 7 miliar," sambungnya.

Saat menyampaikan laporan, Sugeng mengaku membawa bukti chat dan bukti transfer uang. Ada 4 bukti kiriman dana. "Ini yang paling penting, transfer. Kemudian ada chat yang menegaskan bahwa Wamen EOSH mengakui adanya satu hubungan antara dua orang Asprinya yang menerima dana disebut," kata Sugeng.

Aspri Eddy Hiariej yang disebut Sugeng itu adalah YAR dan YAM. Belum diketahui jelas identitasnya.

"Sehingga terkonfirmasi bahwa dana yang masuk ke rekening yang bernama YAR dan YAM adalah terkonfirmasi sebagai orang yang disuruh atau terafiliasi dengan dirinya," imbuhnya.

Sugeng menjelaskan bahwa pemberian uang itu terkait dalam tiga peristiwa. Pertama, pada April dan Mei 2022. Saat itu melalui asistennya, YAR, Prof Eddy disebut menerima Rp 4 miliar. "Rp 4 miliar yang diduga diterima oleh Wamen EOSH [Edward Omar Sharif Hiariej] melalui asisten pribadinya di Kemenkumham Saudara YAR," kata Sugeng.

Pemberian tersebut, kata Sugeng, berkaitan dengan seorang bernama HH yang meminta konsultasi hukum kepada Wamen Prof Eddy. Belum diketahui konsultasi hukum apa yang dimaksud. "Kemudian oleh Wamen diarahkan untuk berhubungan dengan Saudara ini [YAR] namanya ada di sini [bukti transfer]," ungkap Sugeng.

Sugeng menyebut, melalui perintah Prof Eddy, YAP dan HH kemudian membangun komunikasi.

Peristiwa kedua, lanjut Sugeng, adalah pemberian dana tunai yang disebut terjadi pada Agustus 2022 sebesar Rp 3 miliar. Diberikan dalam bentuk mata uang dolar AS.

"Yang diterima tunai oleh juga asisten pribadi YAR, di ruangan Saudara YAR. Diduga atas arahan Saudara Wamen EOSH, Agustus," terang Sugeng.

Pemberian dilakukan oleh HH selaku Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri (CLM). "Pemberian tersebut diduga dikaitkan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM yang disahkan oleh AHU [Administrasi Hukum Umum]," ungkap Sugeng.

Kata Sugeng, pengesahan itu pun muncul. Namun pada tanggal 13 September 2022, pengesahan tersebut di-takedown atau dihapus. Muncul susunan direksi baru PT CLM, tapi dengan susunan direksi baru bernama ZASZAS dan HH sedang bersengketa kepemilikan saham PT CLM. "Jadi kecewa Saudara HH sebagai pemilik IUP, menjadi kecewa," ungkap Sugeng. Karena kecewa, HH melalui saksi advokat bernama A k e m u d i a n m e n e g u r P r o f E d d y. "Tindakan Anda tidak terpuji", balik badan lah gitu, ya," kata Sugeng.

Lalu pada 17 Oktober, uang Rp 7 miliar dikembalikan melalui transfer oleh YAR ke rekening PT CLM. Pengembalian ini disimpulkan oleh Sugeng bahwa melalui Aspri-nya, Wamenkumham benar menerima dana tersebut.

Uang Rp 7 miliar dikembalikan, tapi oleh PT CLM ditransfer lagi ke rekening Aspri Prof Eddy, bernama YAM. "Pada tanggal 17 Oktober pukul 14.36 dikirim kembali oleh PT CLM ke rekening bernama YAM, Aspri juga dari Saudara Wamen EOSH," jelas Sugeng.

Peristiwa ketiga, tambah Sugeng, dalam hubungan komunikasi antara Dirut PT CLM, Prof Eddy disebut meminta dua Aspri-nya untuk dapat ditempatkan sebagai komisaris PT CLM. "Kemudian, diakomodasi dengan adanya akta notaris. Satu orang yang tercantum, Saudara YAR ini aktanya, ya," kata Sugeng.

Tiga perbuatan ini yang dinilai menyalahi wewenangnya sebagai pejabat. Sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM. Ini juga menjadi dasar laporan dugaan tindak pidana korupsi atau gratifikasi yang dilaporkan Sugeng ke KPK. "Jadi ada 3 perbuatan. Rp 4 miliar, Rp 3 miliar kemudian permintaan tercantum," pungkash Sugeng.

Urusan Pribadi Aspri

Wamenkumham Eddy Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej dilaporkan ke KPK oleh IPW terkait dugaan gratifikasi Rp 7 miliar. "Saya ingin menanggapi secara serius." "Terkait aduan Sugeng kepada KPK, saya tidak perlu menanggapi secara serius karena pokok permasalahan adalah hubungan profesional antara aspri saya YAR dan YAM sebagai lawyer (pengacara) dengan kliennya, Sugeng (Ketua IPW)," kata Eddy saat dimintai konfirmasi, Selasa (14/3/2023).

Eddy menyerahkan urusan klarifikasi kepada asprinya. Dia mengatakan asprinya itu berinisial YAR dan YAM. "Silakan konfirmasi lebih lanjut kepada YAR dan YAM yang disebutkan oleh Sugeng dalam aduannya," katanya.

Sebelumnya, Plt juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan soal adanya laporan tersebut. Namun dia tidak bisa merinci substansinya. KPK akan melakukan verifikasi atas laporan tersebut. "Tim pengaduan masyarakat juga akan pro aktif berkoordinasi dengan pelapor dan melakukan pengayaan informasi dan data terkait pelaporan tersebut," kata Ali dalam keterangannya.

"Namun yang pasti KPK segera lakukan verifikasi dan telaah," kata Ali dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (14/3/2023).

Ali mengatakan, verifikasi dilakukan guna memastikan laporan Sugeng sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga bisa ditindaklanjuti oleh lembaga antirasuah. Juru bicara berlatar jaksa itu menyatakan Tim Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK akan bersikap lro aktif berkoordinasi dengan pihak Sugeng. "Melakukan pengayaan informasi dan data terkait pelaporan tersebut," tutur dia.

Asisten Pribadi (Aspri) Wamenkumham, Yogi Arie Rukmana akan menggelar konferensi pers untuk mengklarifikasi laporan Ketua PW Sugeng Teguh Santoso ke KPK. "Nanti kita atur waktu hari ini juga untuk kita adakan konpers untuk menanggapi tuduhan dari Ketua IPW ke saya. Saya akan jelaskan seterang-terangnya bagaimana duduk persoalannya," kata Yogi Arie.

Yogi bakal buka-bukaan soal tuduhan Sugeng Teguh Santoso terkait adanya dugaan aliran dana ke rekeningnya. Ia berjanji membongkar kebenaran sesungguhnya karena ia difitnah atas laporan itu. "Nanti kita akan buka semua. Saya mohon waktu, nanti kita kumpul bareng, saya akan jelaskan seterang-terangnya dengan bukti-bukti yang saya rasa sih tuduhan ke kami itu sangat-sangat tidak baik," katanya.

Terkait berapa gaji Wamenkumham, besaran hak keuangan wakil menteri tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 176/PMK.02/2015 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri. Adapun nominal yang akan diterima yakni 85 persen dari tunjangan menteri.

Diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Tertentu, besaran tunjangan menteri adalah Rp13,61 juta per bulan. Maknanya, wakil menteri akan menerima Rp 11,57 juta tiap bulannya.

Tak hanya itu, wakil menteri juga akan menerima hak sebanyak 135 persen dari tunjangan kinerja pejabat struktural eselon IA yang peringkat jabatannya tinggi. Namun, penetapan tunjangan ini hanya berlaku di kementerian tempat ia bertugas.

Misalnya saja pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di mana tunjangan kinerja paling tinggi adalah Rp 33,24 juta. Dengan kata lain, tunjangan kinerja yang bisa diperoleh wakil menteri pada kementerian itu tiap bulannya sebesar Rp 44,87 juta.

Kemudian, bagi wakil menteri yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), hak keuangan tersebut diberikan dengan memperhitungkan gaji pokok yang diterima sebagai pegawai negeri. Di sisi lain, mereka

juga memperoleh berbagai fasilitas. Diantaranya, rumah jabatan, kendaraan dinas, hingga jaminan kesehatan. Terkait rumah jabatan, jika kementerian yang bersangkutan tidak menyediakannya, maka wakil menteri perlu diberi tunjangan perumahan senilai Rp 35 juta per bulan.

Untuk kendaraan dinas, wakil menteri diberikan setara dengan biaya pengadaan kendaraan bagi pejabat struktural eselon IA. Lalu, kesehatan mereka pun dijamin oleh negara. Adapun pemenuhan hak keuangan tersebut secara keseluruhan diambil dari anggaran kementerian. (wid,rls,ist,ant/dya)

PROFIL
EDWARD OMAR
SHARIF HIARIEJ

1. PERJALANAN KARIER

Sosok yang akrab disapa Prof Eddy itu sebelumnya dikenal sebagai saksi ahli pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam sengketa hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi dalam Pilpres 2019. Meski tergolong masih muda, ia sudah sering terlibat sebagai saksi ahli di berbagai persidangan.

Satu di antaranya adalah bersaksi di kasus yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama pada tahun 2017.

Eddy sudah menerbitkan sejumlah buku. Di antaranya Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana (2009), Teori dan hukum Pembuktian (2012), Prinsip-prinsip Hukum Pidana (2016), Pengantar Hukum Pidana Internasional (2009), Hukum Acara Pidana (2015), Pengadilan Atas beberapa Kejahatan Serius Terhadap HAM (2010) dan sebagainya.

2. RIWAYAT PENDIDIKAN

Eddy menempuh jenjang pendidikan tingginya mulai S1 hingga meraih gelar profesor di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sejak remaja, Eddy Hiariej sudah berminat untuk terjun ke dunia hukum. Almarhum ayahnya pernah mengatakan bahwa ia cocok menjadi jaksa. Namun di kemudian hari almarhum ayahnya mengatakan agar Eddy Hiariej menjadi pengacara saja. Ayahnya menginginkan agar ia bisa membela orang, bukan mendakwa.

Setelah lulus SMA pada 1992, Eddy memutuskan untuk memasuki Fakultas Hukum UGM. Dia pernah gagal lulus tes Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN). Namun akhirnya bisa lolos.

Pria yang lahir di Ambon, Maluku, pada 10 April 1973 itu berhasil memperoleh gelar M.Hum di tahun 2004 dan Gelar Doktor pada 2009. Eddy Hiariej mendapatkan gelar profesor di usia 37 tahun dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.



Sebuah kapal bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta melakukan bongkar muat produk ekspor. (Dok)

UTANG LUAR NEGERI RI TEMBUS RP 6.255,7 T, AMAN?

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan, pada Januari 2023 utang luar negeri RI sebesar 404,9 miliar dollar AS (sekira triliun). Nilai itu naik sekitar 2,04 persen dibanding posisi bulan sebelumnya (month to month/mtm) sebesar 396,8 miliar dollar AS.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan posisi Januari tahun lalu (year on year/yoy), utang luar negeri RI menyusut sekitar 1,9 persen. Tercatat pada Januari 2022 utang luar negeri RI sebesar 413,6 miliar dollar AS. "Kontraksi pertumbuhan ini bersumber dari ULN pemerintah dan sektor swasta," tulis Direktur Eksekutif BI, Erwin Haryono, dalam keterangannya, Selasa (14/3/2023).

Adapun utang luar negeri RI pada awal tahun ini dibentuk oleh utang luar negeri pemerintah sebesar 194,3 miliar dollar AS. Posisi itu naik 4,2 persen secara mtm, namun terkontraksi 2,5 persen secara yoy.

Bank sentral menilai, posisi utang luar negeri pemerintah relatif aman dan terkendali. Pasalnya, hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,7 persen dari total ULN pemerintah.

Sementara itu, posisi utang luar negeri swasta sebesar 210,2 miliar dollar AS per Januari 2023. Nilai ini stagnan secara mtm dan susut sebesar 1,5 persen secara yoy.

Jika dilihat berdasarkan tenornya, utang luar negeri swasta juga didominasi oleh utang tenor jangka panjang. BI mencatat, utang jangka

panjang swasta porsinya mencapai 75,2 persen dari total utang luar negeri swasta.

Adapun rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga Januari 2023 mencapai 30,3 persen. Nilai ini meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 30,1 persen.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam peman-tauan perkembangan ULN," ucap Erwin.

APBN Februari 2023 Surplus Rp 131 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada akhir Februari 2023 surplus Rp 131,8 triliun.

Sri Mulyani menilai, kinerja APBN hingga Februari 2023 terjaga sangat baik. Hal itu diketahui dari beberapa indikator. Salah satunya adalah pendapatan negara. "Pendapatan negara sampai akhir Februari terkumpul Rp 419,6 triliun, ini artinya 17 persen dari target penerimaan negara sudah dikumpulkan pada dua bulan pertama, yakni Januari - Februari," kata Sri Mulyani di acara konferensi pers "APBN Kita" di Jakarta, Selasa (12/2/2023) Maret 2023.

Kondisi ini artinya, kata Sri Mulyani, pertumbuhan dari

pendapatan negara adalah 38,7 persen year on year (yoy). Ini terdiri dari pajak, bea dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak

"Belanja negara sampai akhir Februari, pemerintah telah membelanjakan Rp 287,8 triliun," ujar Sri Mulyani.

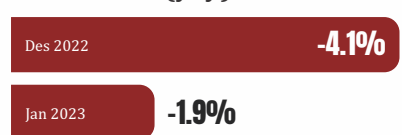
Ini berarti 9,4 persen dari total

belanja negara yang ada di dalam APBN 2023 sudah dibelanjakan. Jumlah ini naik 1,8 persen dari belanja tahun sebelumnya.

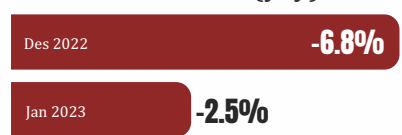
"Dengan demikian, surplus APBN pada akhir Februari 2023 sebesar Rp 131,8 triliun, keseimbangan primer juga surplus Rp 182,2 triliun," tuturnya. (wid,rls,kcm/dya)

UTANG LUAR NEGERI (ULN) INDONESIA

PERTUMBUHAN ULN INDONESIA (yoy)



ULN PEMERINTAH (yoy)



ULN pemerintah masih berada dalam fase kontraksi, didorong oleh:

- Peningkatan penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) global yang makin meningkat domestik dan internasional seiring sentimen positif kepercayaan pelaku pasar

ULN SWASTA (yoy)



ULN Swasta juga melanjutkan tren kontraksi pertumbuhan.

- Pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) mengalami kontraksi sebesar 1,1% (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,5% (yoy).
- Pertumbuhan ULN lembaga keuangan (financial corporations) mengalami kontraksi 3,1% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 2,7% (yoy).

